harus dipatuhi oleh para TKI salah satunya karantina. Pemerintah memberi fasilitas karantina gratis di wisma atlet namun ada hal aneh di sini. Ketika para TKI telah tiba di bandara hanya ada 2 atau 3 orang pengurus administrasi untuk pengajuan karantina tersebut yang jelas itu sangat tidak cukup untuk melayani ribuan TKI. Namun pemerintah tidak mengambil langkah inisiatif untuk menambah pengurus administrasi atau memberi penampungan sementara agar para TKI tidak harus terlantar 20 jam di bandara akibat dari hal tersebut. Dalam keadaan bingung dan lelah seorang perempuan dia bersama rekannya juga ditawari oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan karantina mandiri di hotel. Namun, betapa kagetnya dia dengan harga yang disebut "Mau di hotel 1 orangnya Rp 19 juta". Yang mungkin uang dengan jumlah itu adalah jumlah upah untuk 3 bulan kerja mereka. dengan praktek ini kita jadi berasumsi bahwa kekurangan pengurus administrasi dan lambatnya pelayanan adalah sebuah kesengajaan agar para TKI mau tidak mau harus merogoh kocek sendiri untuk karantina yang seharusnya jadi tanggung jawab negara. dan jelas hotel-hotel tersebut akan mendapatkan pemasukan yang praktis dengan jumlah yang fantastis.

inilah permasalah yang harus timbul jika pejabat publik merangkap pengusaha. Semua harus jadi untung!

Asimetris

When The Rich Rob The Poor It's Called Business

LEAFLET MENYIMPANG / 2022
OLEH: AKULAHPELURU

“WHEN THE RICH ROB THE POOR, IT’S CALLED BUSINESS”

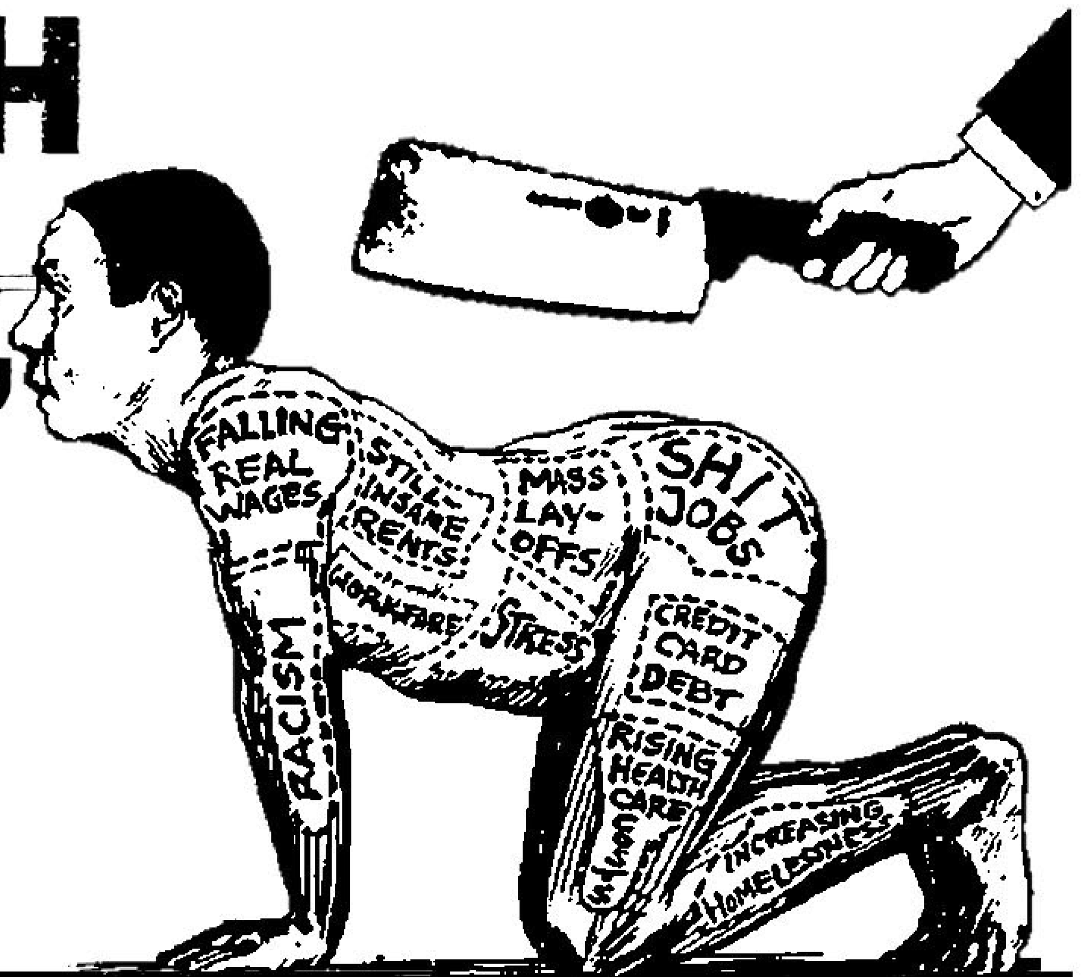

OLEH: AKULAHPELURU

Hari ini kita hidup dimana uang merupakan alat transaksi utama entah berupa dalam bentuk kertas maupun uang elektronik. Dalam ilmu ekonomi uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Meski banyak dari kita juga menyadari bahwa uang adalah sumber masalah. Salah satu nya adalah menciptakan jurang disparitas antar manusia, terbentuknya dua kelompok yaitu kelompok yang hidup serba berkecukupan namun di sisi jurang lain ada mereka yang bahkan tidak memiliki makanan. Ditambah jika harus hidup di bawah kapitalisme, meski konsep pasar bebas nya terdengar seperti malaikat penolong namun tetap kapitalisme memaksa mereka yang tak memiliki kekuasaan dan kekuatan materiil tetap ada pada dasar piramid dalam kata lain mereka harus tetap menjadi budak untuk tuan-tuan yang menghuni puncak piramid bagaimanapun adanya.

kita semua tahu hampir harus selalu ada klasifikasi untuk sebuah pekerjaan. Seperti jika kamu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, kamu hanya bisa menjadi buruh paruh waktu entah kuli bangunan, penjaga parkir dan pekerjaan-pekerjaan lain yang di upah rendah. Tapi jika kamu mampu membayar biaya pendidikan yang mahal kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kata lain kamu malah harus membayar untuk sebuah pekerjaan. Aneh memang.

“klaster pendidikan”. Ketika masih menjadi Rancangan Undang Undang (RUU), pembahasan mengenai pendidikan sempat dicabut dari pembahasan badan legislasi. Namun setelah disahkannya menjadi UU, klaster pendidikan masih tetap ada dalam tubuh UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Klaster pendidikan terdapat pada paragraf 12, pasal 65 UU Cipta Kerja tentang pendidikan dan kebudayaan. Seolah-olah ini adalah prank yang dilakukan oleh DPR RI kepada rakyat. Hal ini langsung menuai kecaman dari aktivis maupun pakar pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Taman siswa (PKBT), Darmaningtyas, beliau mengkhawatirkan aturan itu akan membuat pendidikan semakin mahal dan tak terjangkau bagi mereka yang miskin. Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba. Lembaga pendidikan pun tidak mengajukan izin berusaha, karena bukan badan usaha yang mengejar keuntungan. “Yang sudah pasti sekarang ini ada keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan. Itu akan semakin kuat (dengan aturan dalam Omnibus Law) karena pendidikan itu izinnya sebagai badan usaha. “Kalau badan usaha itu untuk mencari keuntungan sehingga praktik pendidikan sebagai bisnis akan semakin khas.

Dalam pelayanan kesehatan, kendati pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, namun menurutku itu tidak menjamin apa-apa. Beberapa minggu lalu adikku mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus di bawa ke rumah sakit, setelah mendapat kabar itu aku bergegas ke rumah sakit. Disana di ruang IGD yang seharusnya menjadi instalasi gawat darurat berubah menjadi medan jual beli tak ada satupun dokter atau perawat yang mau menyentuh adikku. Mereka hanya terus-terusan membicarakan uang, uang dan uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Terbayang jika orang yang datang dalam keadaan sekarat mereka mungkin akan dibiarkan mati begitu saja karena tidak ada uang jaminan yang masuk. Bukankah terminologi rumah sakit Selama abad pertengahan adalah sebagai penampungan orang miskin atau persinggahan musafir, apakah telah berubah menjadi pasar-pasar jual beli obat yang hanya melayani orang-orang kaya? Entahlah. Ini semua yang mereka sebut bisnis.

Kemarin aku membaca berita tentang kepulangan para pekerja migran atau biasa disebut TKI kembali ke indonesia, namun karena kita sedang dalam keadaan pandemi jadi ada beberapa protokol yang